

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa

Resti Mutiara¹, Dwirani Puspa Artha²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: restimutiara02@gmail.com, dwiranipuspa@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

8 Agustus 2025

Disetujui:

10 Agustus 2025

Terbit daring:

14 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Mutiara, R. & Artha, D.P (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa.

Abstract:

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD) on income distribution inequality in Java Island, measured using the Gini ratio. The primary focus of the research is to identify how PAD influences income inequality. Additionally, it examines the effects of the Provincial Minimum Wage (UMP), informal labor in the agricultural sector, education level measured by average years of schooling, Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth, infrastructure measured by road length, and the Human Development Index (HDI) from 2015 to 2024. The method employed in this study is Beta Regression. The analysis results show that PAD has a negative and significant effect on income inequality. Similarly, UMP and HDI also have negative and significant effects on income inequality. Meanwhile, informal labor, average years of schooling, GRDP growth, and road infrastructure have positive and significant effects on income inequality

Keywords: Income Inequality, Gini Ratio, Regional Original Revenue.

Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa yang diukur menggunakan rasio gini. Fokus utama studi adalah mengidentifikasi bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu mengidentifikasi bagaimana pengaruh UMP, tenaga kerja informal di sektor pertanian, tingkat pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah, pertumbuhan PDRB, infrastruktur yang diukur dari panjang jalan, dan IPM dari tahun 2015 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Regresi Beta. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, UMP dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian tenaga kerja informal, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan PDRB, dan infrastruktur panjang jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

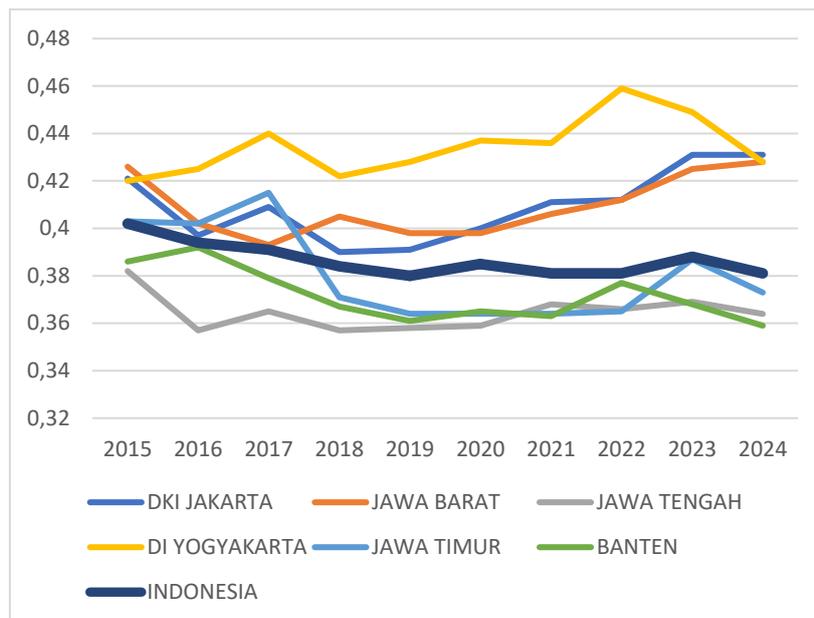
Kata Kunci: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Rasio Gini, Pendapatan Asli Daerah

Kode Klasifikasi JEL: D63, I14, I24

PENDAHULUAN

Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi permasalahan global yang masih dihadapi dan mempengaruhi stabilitas sosial ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini ditandai dengan kesenjangan yang terjadi antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, dimana sebagian kecil dari populasi menguasai sebagian besar kekayaan dan sumber daya nasional, sementara sebagian besar lainnya mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka (Hababil et al., 2024). Kondisi ini semakin diperparah oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan akses terhadap kesempatan kerja yang berkualitas, tingkat pendidikan, hingga layanan kesehatan, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus (Susanto et al., 2025).

Pulau Jawa sering di sebut pusat aktivitas perekonomian Indonesia, dimana ketimpangan yang dilihat dari nilai rasio gini yang di peroleh lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Keadaan ini bisa saja dikarenakan ketidakmeratanya pendapatan yang diperoleh seluruh lapisan Masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Grafik 1. Rasio Gini Pulau Jawa Tahun 2015-2024

Berdasarkan grafik 1, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), menggambarkan rasio gini untuk semua provinsi di Pulau Jawa. Pada tahun 2022, Provinsi Yogyakarta menunjukkan angka rasio gini sebesar 0.459. Namun pada tahun yang sama ketimpangan di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang semuanya berada di atas rata-rata nasional. Angka ini lebih tinggi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hal ini menjadi mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi juga antarwilayah, yang mencerminkan adanya disparitas regional yang tajam akibat ketimpangan pembangunan, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah (Astuti, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih dalam berbagai faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan tersebut, baik dari sisi fiskal daerah maupun indikator sosial ekonomi lainnya.

Ketimpangan ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya dan kemampuan fiskal daerah. Salah satu indikator penting yang mencerminkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan berasal dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, serta lain-lain. Daerah dengan PAD lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan melakukan pembangunan infrastruktur secara mandiri. Namun demikian, tingginya PAD tidak serta-merta menjamin tercapainya pemerataan pendapatan jika tidak dikelola secara efektif dan inklusif. Penelitian sebelumnya oleh Alfiansyah & Budyandra (2020) dan Lutfiani & Yuniasih (2021) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun arah pengaruhnya bisa bervariasi tergantung pada struktur belanja daerah. PAD yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, tanpa peningkatan produktivitas masyarakat, justru dapat memperlebar jurang ketimpangan. Selain itu, terdapat pula temuan yang menunjukkan bahwa daerah dengan PAD tinggi tetap memiliki ketimpangan pendapatan yang besar, yang menandakan bahwa efektivitas penggunaan PAD menjadi faktor kunci dalam menekan ketimpangan.

Tidak hanya faktor PAD saja, ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti upah minimum provinsi (UMP), proporsi tenaga kerja informal, tingkat pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), infrastruktur yang diukur dari panjang jalan, serta pembangunan manusia diukur dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia). UMP merupakan upah yang

diperoleh Masyarakat yang berperan strategis dalam menjamin penghasilan minimum masyarakat, terutama pada kelompok pekerja. Namun jika kenaikan UMP tidak merata, justru dapat memperbesar kesenjangan antarwilayah. Menurut Ivanovi Sulistyaningrum et al. (2022), UMP berpengaruh dan signifikan terhadap menekan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi. Sementara itu, tenaga kerja informal yaitu pekerja yang tidak memiliki ikatan kerja yang resmi, pendapatan yang tidak tetap, dan tidak mendapatkan perlindungan atau jaminan sosial. Tenaga kerja ini biasanya pekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas (Kamalina, 2023). Hal ini akan mempengaruhi tenaga kerja informal jika tingginya proporsi tenaga kerja informal dengan upah dan produktivitas rendah menyebabkan terjadinya semakin parah ketimpangan struktural dalam distribusi pendapatan yang diperoleh.

Kemudian pada tingkat pendidikan juga berperan penting dalam membentuk ketimpangan pendapatan. Umumnya daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mendapatkan akses lebih luas dalam mendapatkan pekerjaan formal dan mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah menyebabkan adanya keterbatasan dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antarwilayah juga memperkuat ketimpangan, terutama bila hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau sektor tertentu. Infrastruktur, seperti panjang jalan yang layak, berpengaruh dalam membuka akses ekonomi dan mobilitas penduduk. Sedangkan IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia dari segi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pemerataan pendapatan.

Dalam mengukur hubungan antara PAD dan ketimpangan pendapatan, metode yang digunakan juga memiliki peran penting. Rasio gini yang digunakan sebagai variabel dependen berbentuk proporsi dan memiliki batasan antara 0 hingga 1, sehingga tidak cocok jika dianalisis menggunakan model regresi linear biasa. Untuk itu, pada penelitian menerapkan model regresi beta, yang dinilai lebih sesuai karena dapat menangani data proporsional secara akurat dan menghasilkan estimasi yang lebih robust. Dalam studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa serta mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut. Melalui studi ini, diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan dinamika ketimpangan wilayah di Pulau Jawa, serta diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan fiskal yang lebih adil dan efektif.

Teori ketimpangan distribusi pendapatan oleh Kuznets dilihat dari hipotesis yakni hipotesis “U-terbalik” menyatakan awal pelaksanaan pembangunan di suatu daerah menyebabkan distribusi pendapatan ini semakin menyimpang. Namun semakin tercapainya pembangunan daerah tertentu maka semakin maratnya distribusi pendapatan yang diperoleh.



Gambar 1. Kurva kuznets Hipotesis “U-terbalik”

Gambar 1 di atas, tampaknya pada tahap awal perkembangan, distribusi pendapatan cenderung semakin timpang. Namun, setelah mencapai tingkat tertentu, distribusi pendapatan mulai membaik dan menjadi lebih adil. Menurut Kuznets, fase peningkatan dan penurunan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan tergantung pada kebijakan dan

proses pembangunan yang diterapkan di setiap wilayah (Todaro & Smith, 2020). Pengukuran ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan umumnya menggunakan rasio Gini atau koefisien Gini. Ini adalah salah satu cara untuk menilai sejauh mana ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan berdasarkan kurva Lorenz. Dalam rasio Gini ini, nilai yang digunakan berkisar antara 0 hingga 1 (BPS, 2024).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data sekunder dan data kuantitatif, khususnya data panel provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 2015-2024. Sumber data ini di peroleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Variabel yang diteliti dalam studi ini ketimpangan distribusi pendapatan, PAD, UMP, tenaga kerja informal di sektor pertanian, tingkat pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah, pertumbuhan PDRB, infrastruktur dari panjang jalan, dan pembangunan manusia dari IPM. Studi ini menggunakan model regresi beta dengan menggunakan STATA 17.

Studi ini menggunakan model regresi beta bertujuan untuk menganalisis data dengan variabel dependen berbentuk proporsi (nilai antara 0 dan 1), seperti tingkat ketimpangan, rasio, atau probabilitas Ferrari & Cribari-Neto (2004). Dalam studi ini rasio gini sebagai variabel dependen, merepresentasikan ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Karena nilai rasio gini ini selalu berada pada rentang (0,1) dan bersifat kontinu, maka model regresi beta menjadi model yang paling sesuai untuk digunakan.

Berikut adalah persamaan yang digunakan:

$$\text{Logit atau } g(\mu_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD}_{it} + \beta_2 \text{UMP}_{it} + \beta_3 \text{TKI}_{it} + \beta_4 \text{RLS}_{it} + \beta_5 \text{PDRB}_{it} + \beta_6 \text{PJ}_{it} + \beta_7 \text{IPM}_{it} \quad (1)$$

Diketahui: variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan (μ_{it}), variabel Independen adalah pendapatan asli daerah (PAD), upah minimum provinsi (UMP), tenaga kerja informal di sektor pertanian (TKI), tingkat pendidikan (RLS), pertumbuhan PDRB (PDRB), Infrastruktur (PJ) serta indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan variabel kontrol. β_1 - β_7 merupakan parameter regresi yang di estimasi.

Dalam regresi beta, dua (2) tes akan dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dibuat memenuhi asumsi statistik. Tes pertama adalah tes spesifikasi model, yang mencakup pengujian asumsi distribusi, fungsi hubungan, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Tes kedua adalah pengujian signifikansi parameter, yang meliputi uji Wald, uji Z, dan pengujian signifikansi simultan menggunakan Likelihood Ratio (LR) Test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penerapan regresi beta dalam analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015-2024. Pemodelan regresi beta ini diperoleh dari data rasio gini untuk nilai ketimpangan distribusi pendapatan, pendapatan asli daerah, upah minimum provinsi, tenaga kerja informal di sektor pertanian, tingkat pendidikan dari rata-rata lama sekolah, pertumbuhan PDRB, infrastruktur dari panjang jalan, dan pertumbuhan manusia dari indeks pembangunan manusia. Model persamaan yang diperoleh dari hasil regresi beta sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Beta

| Variabel | Koefisien | P-value |
|---|------------------|--------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | -0,2582*** | 0,000 |
| Upah Minimum Provinsi (UMP) | -0,1629*** | 0,003 |
| Tenaga kerja informal di Sektor Pertanian | 0,0035*** | 0,000 |
| Tingkat pendidikan dari Rata-rata Lama Sekolah | 0,4100*** | 0,000 |
| Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 0,0092*** | 0,006 |
| Infrastruktur dari Panjang Jalan | 0,3210*** | 0,000 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | -0,0436*** | 0,000 |
| Konstanta | 6,1367*** | 0,000 |
| Log likelihood | 176,467 | |
| LR Chi² (7) | 92,86 | |
| Prob>Chi² | 0,000 | |

Catatan: *, **, dan *** menunjukkan signifikansi statistik pada tingkat 10%, 5%, dan 1%, berturut-turut. Sumber: hasil olahan data Stata 17.

$$\begin{aligned} \text{logit atau } (\mu_{it}) &= 6,1367 - 0,2582PAD_{it} - 0,1629UMP_{it} + 0,0035TKI_{it} + 0,41002RLS_{it} \\ &+ 0,0092PDRB_{it} + 0,3210PJ_{it} - 0,0436IPM_{it} \end{aligned}$$

Uji Wald

Uji ini bertujuan untuk memperoleh hasil kontribusi masing-masing variabel independen dan variabel kontrol terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pada nilai probabilitas alfa yang di tetapkan sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Jika hasil uji ini diperoleh bahwa variabel dalam model regresi nilai $p < 0,01$, yang berarti berpengaruh signifikan secara statistik terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang ada pada Pulau Jawa. Adapun dengan hipotesis yang ditetapkan adalah:

Jika $H_0: \beta_1 = 0$, variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Jika $H_1: \beta_1 \neq 0$, variabel independen memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Hasil pengujian menunjukkan beberapa temuan penting, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pada variabel PAD, nilai probabilitas PAD sebesar $0,000 < 0,01$. Nilai ini mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, maka hipotesis H_1 diterima.
2. Pada variabel UMP, nilai probabilitas UMP sebesar $0,003 < 0,01$. Mengindikasikan bahwa UMP berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, maka hipotesis H_1 diterima.
3. Pada variabel tenaga kerja informal di sektor pertanian, nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,01$. Mengindikasikan bahwa tenaga kerja informal di sektor pertanian

berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, maka hipotesis H1 diterima.

4. Pada variabel tingkat pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah, nilai probabilitas rata-rata lama sekolah sebesar $0,000 < 0,01$. Mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, maka hipotesis H1 diterima.
5. Pada variabel Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai probabilitas pertumbuhan PDRB sebesar $0,006 < 0,01$. Mengindikasikan bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, maka hipotesis H1 diterima.
6. Pada variabel infrastruktur dari panjang jalan, nilai probabilitas panjang jalan sebesar $0,000 < 0,01$. Mengindikasikan bahwa panjang jalan berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, maka hipotesis H1 diterima.
7. Pada variabel indeks pembangunan manusia (IPM), nilai probabilitas IPM sebesar $0,000 < 0,01$. Mengindikasikan bahwa IPM berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa, maka hipotesis H1 diterima.

Uji Simultan

Dalam studi ini diketahui bahwa pengaruh variabel independen dan variabel kontrol mengenai ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan berpengaruh, sebagaimana dibuktikan oleh nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,01$. Artinya setiap variabel mempunyai pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan, maka hipotesis H1 diterima. Model ini dapat digunakan secara layak dan relevan dalam menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

Uji Likelihood Ratio (LR Test)

Pada studi ini diketahui hasil uji LR Chi² menunjukkan nilai sebesar 92,86 dengan p-value 0,000. Artinya H₀ ditolak dan H₁ diterima, ini menunjukkan semua variabel PAD, dan variabel kontrol secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Sisanya sebesar 7,27% merupakan variasi yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Arah hubungan pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa

Dalam studi ini variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif pada ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien sebesar 0,2582. Artinya PAD naik sebesar satu satuan yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui PAD berperan dalam mempersempit kesenjangan ekonomi. Hasil studi ini selaras dengan penelitian Juliana & Soelistyo (2019), bahwa PAD berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten. Dalam studi ini menyatakan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dari PAD mampu mengalokasikan anggaran untuk layanan publik yang inklusif seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Secara empiris mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki sumber PAD yang kuat dan mampu mengelola serta mendistribusikan pendapatannya secara adil kepada masyarakat, memiliki potensi untuk menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah maupun antar individu di dalamnya. Hal ini pada gilirannya membantu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan. Selain itu, dari perspektif kebijakan fiskal, luasnya kontribusi PAD terhadap penurunan ketimpangan yang mencerminkan peran penting otonomi daerah dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Dengan tersedianya sumber PAD yang memadai, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mendesain program-program yang memiliki hubungan terhadap kebutuhan masyarakat lokal, termasuk program pengentasan

kemisikinan, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan infrastruktur dasar. Kemampuan ini menjadi sangat penting di tengah tantangan ketimpangan antarwilayah yang sering kali terjadi akibat terfokusnya pembangunan di kawasan tertentu. Lebih lanjut, peningkatan PAD yang dikelola secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang pada akhirnya mengakibatkan efek pengganda dalam pertumbuhan inklusi. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu daerah untuk tidak hanya meningkatkan penerimaan PAD, tetapi juga memastikan bahwa pendistribusiannya diarahkan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial serta mengurangi ketimpangan struktural yang ada.

Begitu juga dengan variabel UMP pada studi ini, UMP berpengaruh negatif mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien sebesar 0,1629. Ini memperlihatkan bahwa peningkatan UMP sebesar satu satuan maka menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan menurun. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan temuan Juliana & Soelistyo (2019) mengatakan bahwa UMP tidak secara signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan di wilayah yang mereka teliti. Dalam penelitiannya, Juliana & Soelistyo (2019) menyimpulkan bahwa kenaikan UMP belum berpengaruh langsung terhadap pengurangan ketimpangan karena tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas dan pengawasan implementasi yang merata di sektor informal. Oleh karena itu, efektivitas UMP sebagai alat distribusi pendapatan sangat tergantung pada konteks wilayah dan penerapan kebijakannya.

Kemudian, variabel tenaga kerja informal di sektor pertanian berpengaruh positif mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien sebesar 0,0035. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja informal di sektor pertanian mengalami kenaikan, maka semakin besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini selaras dengan hasil studi Satria & Dwi Wulandari (2018) dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan antara pekerja formal dan informal di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan produktivitas, tetapi juga karena diskriminasi dan keterbatasan akses kelompok informal terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa dominasi pekerja informal, khususnya di sektor pertanian adalah pendorong utama ketimpangan pendapatan di tingkat regional. Ditambah lagi, temuan ini juga sejalan dengan Fatonah & Sebayang (2024) mengungkapkan bahwa tenaga kerja memiliki hubungan signifikan terhadap ketimpangan, di mana ketidakseimbangan struktur ketenagakerjaan berpengaruh pada distribusi pendapatan yang tidak merata, khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat produktivitas rendah.

Variabel tingkat pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien sebesar 0,4100. Ini menyatakan, tingkat pendidikan dari rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, maka semakin besar kesenjangan pendapatan yang terjadi. Temuan ini sejalan dengan studi Salzabilah et al. (2025), menegaskan bahwa pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah, secara signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh akses pekerjaan formal dengan upah yang lebih baik, sementara kelompok dengan pendidikan rendah cenderung terjebak di sektor informal yang tidak stabil. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan setara. Temuan serupa dalam studi Nadya & Syafri (2019) yang mengidentifikasi tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien sebesar 0,0092. Hasil koefisien yang diperoleh positif mengindikasikan bahwa peningkatan dalam pertumbuhan PDRB justru disertai dengan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada dasarnya, meskipun ekonomi mengalami pertumbuhan, distribusi manfaat pembangunan belum merata dan cenderung dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi justru membuat semakin memperbesar

kesenjangan pendapatan apabila tidak disertai dengan pemerataan akses terhadap faktor produksi dan layanan publik antarwilayah. Temuan ini diperkuat oleh Kusuma et al (2019) yang mengidentifikasi PDRB berpengaruh signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Studi ini menegaskan PDRB adalah indikator dari pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan seiring peningkatannya.

Infrastruktur yang diukur dari panjang jalan memiliki dampak positif mengenai ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien sebesar 0,3210. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan infrastruktur diukur dari panjang jalan belum sepenuhnya berpengaruh pada pemerataan distribusi pendapatan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan infrastruktur lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah maju yang sudah berkembang, sehingga memperluas kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal. Hasil temuan ini diperkuat Enggar Wishartama et al. (2022), menegaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik seperti infrastruktur dapat memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses dan keterjangkauan antarwilayah.

Sementara pada variabel pembangunan manusia pada IPM berpengaruh negatif mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, koefisien sebesar 0,0436. Temuan studi ini mencerminkan dalam peningkatan kualitas hidup, akses dalam pendidikan, akses pada kesehatan, dan pada standar hidup layak dapat membantu menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini diperkuat oleh Yoertiara & Feriyanto (2022), penelitian ini menemukan bahwa variabel IPM menunjukkan dampak negatif dan signifikan mengenai ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Penelitian mereka menguatkan argumen bahwa pembangunan manusia yang inklusif berperan penting dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya dan menunjukkan urgensi peningkatan IPM sebagai strategi pengurangan kesenjangan ekonomi di tingkat daerah.

Akan tetapi, hasil ini bertentangan dengan temuan Juliana & Soelistyo (2019) di Provinsi Banten. studi ini menemukan variabel IPM tidak berpengaruh secara signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa meskipun terdapat peningkatan IPM dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut belum cukup mampu menekan ketimpangan, karena masih terdapat kesenjangan akses terhadap layanan publik antarwilayah dan antar kelompok pendapatan. Juliana & Soelistyo menyimpulkan bahwa pembangunan manusia harus disertai dengan pemerataan wilayah agar hasilnya bisa berpengaruh pada pengurangan ketimpangan secara efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi beta, model ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol berpengaruh dan signifikan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa secara persial maupun simultan. Hal ini terlihat dari hasil uji wald (persial) dimana menunjukkan seluruh variabel berpengaruh dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,01, serta uji simultannya memiliki probabilitas sebesar 0,000 kecil dari 0,01. Dalam penelitian ini diperoleh variabel PAD, UMP, dan IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan upah minimum dan pembangunan manusia dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan kesenjangan pendapatan. Namun sebaliknya hubungan variabel tenaga kerja informal di sektor pertanian, tingkat pendidikan dari rata-rata lama sekolah, pertumbuhan PDRB, dan infrastruktur dari panjang jalan menunjukkan dampak yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

DAFTAR RUJUKAN

Alfiansyah, H., & Budyanra. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan

- Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 424–429. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>
- Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. *Jurnal Ensiklopedia*, 3(1), 193–205.
- BPS. (2024). *Apa itu Gini Ratio_ - Berita - Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora*.
- Enggar, Wishartama, R., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2022). Analisis kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia (1999-2019) Granger Causality. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 37–46. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.13831>
- Fatonah, A. A., & Sebayang, A. F. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia , Dana Alokasi Umum , dan Angkatan Kerja*. 87–96.
- Ferrari, S. L. P., & Cribari-Neto, F. (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. *Journal of Applied Statistics*, 31(7), 799–815. <https://doi.org/10.1080/0266476042000214501>
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Ivanovi Sulistyaningrum, B., Bhinadi, S.E, M.Si, D. A., & Dwi Astuti, S.E, M.Si, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 891–902. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454>
- Juliana, R., & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pad, Ipm, Dan Umk Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(2), 293–300. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/8232>
- Kamalina, A. R. (2023). *Pekerja Informal Dominasi Sektor Pertanian, Paling Banyak Lulusan SD*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231204/99/1720610/pekerja-informal-dominasi-sektor-pertanian-paling-banyak-lulusan-sd>
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(3), 282–293.
- Lutfiani, D., & Yuniasih, A. F. (2021). Pengaruh Disparitas Capaian Pendidikan Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2012-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 662–671. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.467>
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media*

Ekonomi, 27(1), 37–52. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>

- Salzabilah, F. Y., Somoy, S., Sambeko, T., Indah, A., Hafifa, N., & Ekonomi, J. J. (2025). *Analisis Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Mimika Abstrak*. 11(1), 56–67.
- Satria, D., & Dwi Wulandari, R. (2018). Economics and Finance in Indonesia Income Inequality between Formal-Informal Employees Based on Education Group Income Inequality between Forma. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(1), 25–42. <https://doi.org/10.47291/efi.v64i1.583>
- Susanto, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). *Takwa : Landasan Spiritual dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Mewujudkan Keadilan Sosial*. 11(1), 214–221.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>